



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD DODY FACHRUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**
3. NHK : **65269**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 293.045.000**

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
13.920.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 279.125.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 312.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR / V-IXION Tahun 2012,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
6. MOBIL, SUZUKI JEEP/KATANA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	306.608.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	136.211.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	628.969.555
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.676.833.555
III. HUTANG	Rp.	166.228.128
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.510.605.427

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.